



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD SHALEHUDDIN AKBAR
2. Jabatan : DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI
3. NHK : 168482

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.400.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.400.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 122.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.647.400.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.647.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.